**Logika Hukum (Pertemuan ke-4)**

**Logika Hukum Silogisme (lanjutan)**

1. **Pengambilan Putusan Hakim**

Menurut Abdul Mannan, hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya dapat memilih 3 (tiga) teknik pengambilan putusan yaitu:

1. **Teknik Analitik**

Jika para Hakim mempergunakan metode ini, maka hakim harus menguasai Hukum Acara secara lengkap. Tehnik Analitik paling cocok dipergunakan pada perkara-perkara yang berskala besar dan biasanya dalam hukum kebendaan (Zakenrech).

Metode ini dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan kepada hal-hal umum. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus menguasai pokok masalahnya terlebih dahulu secara real dan akurat, lalu disusunlah pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah tersebut, misalnya dalam bidang kewarisan, hakim harus memulai dengan pernyataan siapa pewaris, lalu siapa ahli warisnya, barang-barang waris apa saja, berapa bagian masing-masing, dan bagaimana pelaksanaannya.

Tentu saja analisa dari pertanyaan tersebut sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti dan menjawab petitum dari gugatan.

Jika penjelasan tentang Hukum Acara belum begitu lengkap, sebaiknya jangan pakai metode ini, sebab sangat sulit dalam hal analisa masalah dan pengambilan keputusan.

1. **Teknik Equatable**

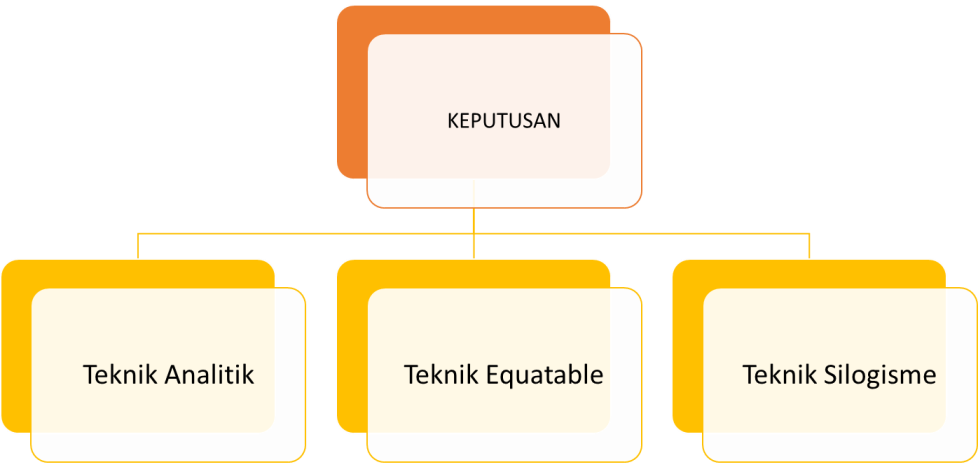
Teknik ini harus dilihat dari segi kosmistis yang dikembangkan dari prinsip keadilan. Isu pokok dulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat.

Apabila alat-alat bukti itu telah diuji kebenarannya, maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkrit, yang kemudian di cari *rule* nya (hukumnya).

1. **Teknik Silogisme**

Teknik ini paling banyak dipakai oleh Hakim karena ia sederhana dan dapat diterapkan dalam peristiwa apa saja. Teknik ini disebut juga dengan metode penalaran deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Penggunaan hukum logika yang dinamakan dengan silogisme menjadi dasar utama aliran ini, dan hakim mengambil kesimpulan dari adanya premise mayor, yaitu peraturan hukumnya, dan premise minor, yaitu peristiwanya.



Gambar 1. Teknik Pengambilan Keputusan oleh Hakim

Secara ringkas silogisme dapat dituliskan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proposisi** | **Nama Lain** | **Bentuk** |
| Proposisi pertama | Premis Mayor | Aturan Hukum |
| Proposisi kedua | Premis Minor | Fakta Hukum |
| Proposisi ketiga | Kesimpulan | Putusan Hukum |

Contoh :

Premis Mayor : Semua Koruptor dihukum - Aturan Hukum

Premis Minor : Mr S Koruptor - Fakta Hukum

Konklusi : Mr S dihukum - Putusan Hukum

1. **Silogisme dalam Putusan Hakim Ataupun Pendapat Ahli Hukum**

Logika dapat digunakan oleh hakim dalam menemukan hukum jika hukumnya tidak lengkap. Kekurangan peraturan perundang-undangan dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum logika dan memperluas pengertian peraturan perundang-undangan berdasarkan rasio.

**Contoh 1:**

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Tuan A menggugat cerai Nyonya B. Perceraian Tuan A dan Nyonya B merupakan perkara di bidang perkawinan

Maka, dalam perkara ini biaya dibebankan kepada Penggugat yaitu Tuan A.

**Analisis contoh 1:**

Premis Mayor : Aturan Hukum

Peraturan Undang-Undang tentang Peradilan Agama pada Pasal 89 ayat (1)

Premis Minor : Fakta Hukum

Tuan A menggugat cerai Nyonya B. Perceraian Tuan A dan Nyonya B merupakan perkara di bidang perkawinan

Konklusi : Putusan Hukum

Biaya dibebankan kepada Penggugat yaitu Tuan A.

**Contoh 2:**

Siapa mencuri dihukum

A terbukti mencuri

Jadi, A harus dihukum

**Analisis contoh 2:**

Premis Mayor : Aturan Hukum

Siapa mencuri dihukum

Premis Minor : Fakta Hukum

A terbukti mencuri

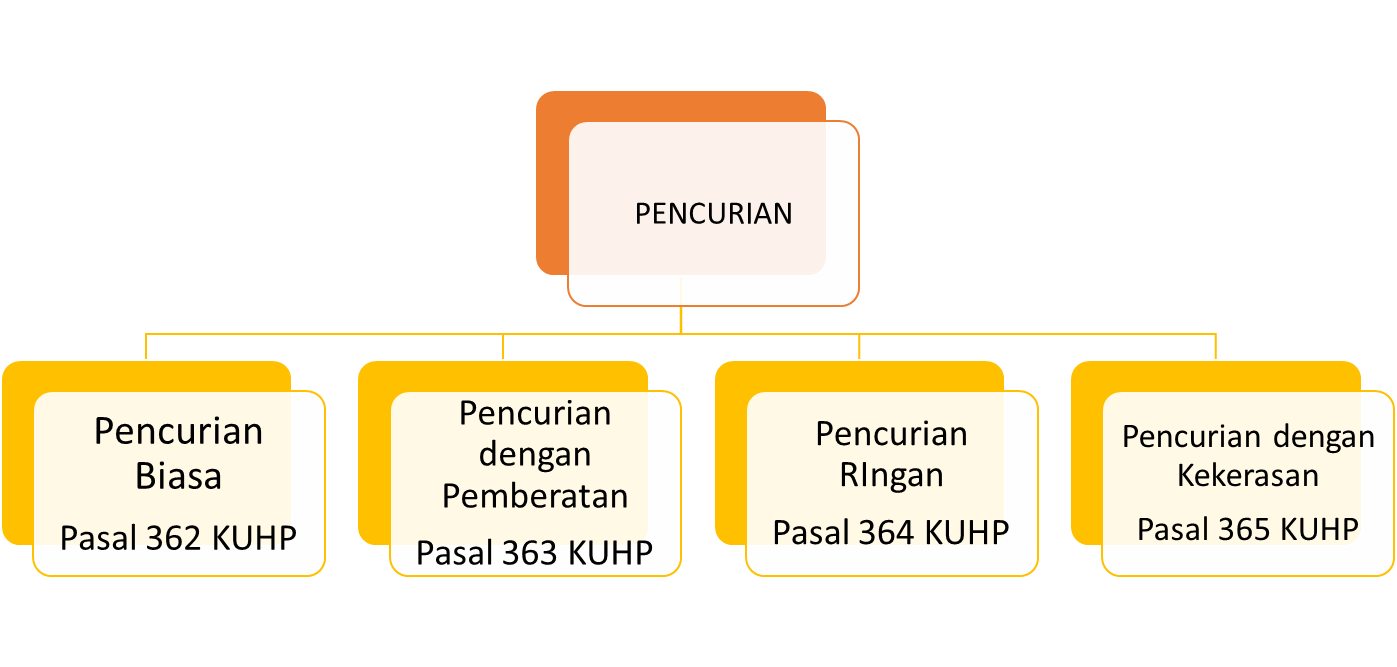
Konklusi : Putusan Hukum

A harus dihukum

Dalam prakteknya, Hakim dalam membuat keputusan tidak hanya sekedar meggunakan logika dalam membuat keputusan tetapi yang paling penting adalah semangat Hakim dalam memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari kebenaran di muka pengadilan.

Jika kita jabarkan secara lebih rinci maka dalam contoh 2 akan menjadi sebagai berikut.

Saat ini pencurian diatur dalam 4 pasal KUHP, yaitu Pasal 362 tentang pencurian biasa, Pasal 363 tentang pasal pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, dan Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan.



Gambar 2. Pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara lengkap bunyi pasal tersebut adalah (cek tautan berikut: https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html)

**Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)**

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur [tindak pidana pencurian](https://seniorkampus.blogspot.com/search/label/Tindak%20Pidana%20Pencurian) (biasa) adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. mengambil;
2. suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. dengan maksud;
2. untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
3. secara melawan hukum

Premis Mayor : Aturan Hukum

Siapa yang melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa akan dihukum

Premis Minor : Fakta Hukum

A terbukti mencuri uang milik B yang disimpang di lemari

Konklusi : Putusan Hukum

Si A dihukum penjara maksimal 5 tahun oleh Hakim.

**Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)**

Bunyi dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

* 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
   1. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Istilah ”pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai ”pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur [tindak pidana pencurian](https://seniorkampus.blogspot.com/search/label/Tindak%20Pidana%20Pencurian) dengan pemberatan  harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

**Contoh:**

Ketika terjadi gempa bumi, beberapa orang mengambil pakaian-pakaian dan perhiasan yang dipajang dan dijual di mall. Melalui kamera CCTV, para pelaku berhasil diidentifikasi dan kemudian ditangkap dan diadili. Bagaimana cara kita merumuskan putusan hakim berdasarkan pendekatan silogisme?

Premis Mayor : Aturan Hukum

Pasal 363 KUHP menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, siapa yag melakukan pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, **gempa bumi** atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang

Premis Minor : Fakta Hukum

A terbukti mencuri pakaian-pakaian dan perhiasan yang dipajang di mall pada saat terjadi gempa bumi.

Konklusi : Putusan Hukum

Si A dihukum penjara maksimal 7 tahun oleh Hakim.

**Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)**

Bunyi Pasal 364 KUHP adalah:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang  ada rumahnya; dan
6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Catatan:

Terkait dengan poin 6 yaitu harga barang yang dicuri itu tidak leboh dari dua puluh lima ribu rupiah, Saudara dapat membuka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP sebagai bahan pengayaan lebih lanjut.

Pasal 1 menyatakan bahwa Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah"

dalam pasal 354, 373, 379, 384,407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2 menyatakan bahwa

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah) Ketua Pengadilan menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, memutuskan perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.

**Contoh:**

Si A mengambil handphone si B senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tergeletak di meja taman. Si A ketahuan mencuri handphone tersebut dan diminta mengembalikan kepada si B. Karena Si A mengelak maka perkara ini dibawa ke pengadilan. Bagaimana cara kita merumuskan putusan hakim berdasarkan pendekatan silogisme?

Premis Mayor : Aturan Hukum

Pasal 364 KUHP dan Pasal 1 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang menyatakan bahwa apabila nilai barang dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah, maka termasuk pidana ringan dengan hukuman penjara pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Premis Minor : Fakta Hukum

A terbukti mencuri handphone senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Konklusi : Putusan Hukum

Si A dihukum pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)**

Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke-2 jika perbuatan  dilakukan  oleh dua  orang  atau lebih dengan bersekutu;

ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

1. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan [pidana](https://seniorkampus.blogspot.com/search/label/Hukum%20Pidana?max-results=5) penjara paling lama lima belas tahun.
2. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

**Contoh:**

Si A dan Si B mengamati bahwa Nyonya C merupakan perempuan yang sudah berumur dan tinggal sendirian di rumah. Nyonya C menempati sebuah rumah besar di pinggir jalan. Si A dan Si B bermaksud merampok Nyonya C. Rencana perampokan tersebut dilaksanakan pada suatu malam. Si A dan Si B masuk ke rumah dengan membongkar paksa kunci pintu di belakang rumah. Pada saat Si A dan Si B masuk, Nyonya memergoki mereka berdua dan mencoba berteriak. Tetapi Si A kemudian mengancam akan membunuh Nyonya C dengan menodongkan senjata dan kemudian mengikat dengan tali plastik yang sudah disiapkan serta membekap mulut nyonya C menggunakan lakban.

Keesokan paginya, Nyonya C ditemukan tetangga yang setiap hari datang ke rumah untuk membantu membersihkan rumah. Setelah dibantu proses penyelematan nyonya C, maka peristiwa ini diselidiki polisi dan akhirnya pelaku yaitu si A dan si B ditangkap. Bagaimana cara kita merumuskan putusan hakim berdasarkan pendekatan silogisme?

Premis Mayor : Aturan Hukum

Pasal 365 KUHP menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk **mempersiapkan atau mempermudah pencurian**, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Pasal 365 KUHP menyatakan bahwa

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

ke-1 jika perbuatan dilakukan **pada malam hari** **dalam sebuah rumah** atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke-2 jika perbuatan  **dilakukan  oleh dua  orang  atau lebih dengan bersekutu;**

ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, **dengan merusak** atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

ke-4 jika perbuatan mengakibatkan **luka-luka berat.**

Premis Minor : Fakta Hukum

Si A dan si B terbukti melakukan perampokan di rumah Nyonya A

Konklusi : Putusan Hukum

Si A dan Si B dapat dihukum pidana penjara paling lama 12 tahun.

1. **Contoh Pengambilan Keputusan Oleh Hakim**

Berikut disajikan contoh bagaimana seorang Hakim menggunaan silogisme dalam mengambil keputusan yang diambil dari material teaching Dr Sidharta dalam blognya: http:// darta67.blogspot.com/2009/12/silogisme-dalam-putusan-hakim.html

**DAKWAAN TUNGGAL**

**Pasal 219 KUHP**

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tidak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 3 minggu atau denda paling banyak Rp300."

Fakta hukum (fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keyakinan majelis hakim):

Hardi (21 tahun) adalah seorang tenaga penjualan (marketing) di sebuah perusahaan properti. Agar cukup banyak orang yang memanfaatkan jasanya, Hardi lalu membuat selebaran yang ditempelkannya di tempat-tempat strategis di kotanya, Tasikmalaya.

Pada tanggal 1 Oktober 2009 (pukul 6.30 WIB) Hardi menempelkan satu selebaran di dinding sebuah halte bis. Dinding halte ini sebelumnya sudah penuh dengan pengumuman, termasuk pengumuman-pengumuman lama yang sudah kadaluwarsa. Hardi melihat ada satu pengumuman yang intinya menghimbau warga berbondong-bondong menggunakan hak pilih mereka dalam pilkada tanggal 1 Oktober 2009 (dimulai pukul 8.00 s.d. 14.00 wib). Pengumuman ini dikeluarkan oleh KPUD kota Tasikmalaya. Pengumuman yang sama juga bisa ditemukan di berbagai penjuru kota, termasuk pada tiang listrik/telepon tidak jauh (sekitar 15 meter) dari halte bis itu. Karena sudah tidak ada lagi tempat kosong tersisa untuk menempelkan sesuatu di dinding halte ini, Hardi lalu menimpa-tindihkan selebarannya tepat di atas pengumuman ajakan pilkada itu. Keesokan harinya, Hardi ditangkap polisi dan sebulan kemudian kasusnya diproses di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 219 KUHP. Anda dan teman-teman adalah majelis hakim yang mengadili kasus ini. Lakukan permusyawaratan majelis hakim untuk memutuskan:

Apakah unsur-unsur tindak pidana Pasal 219 KUHP ini telah terpenuhi?

Untuk itu, buatlah silogisme-silogisme secara utuh untuk keseluruhan unsur tindak pidana menurut pasal tersebut! Jika perlu, berikan suatu penemuan hukum!

**Analisis Norma**

Sasaran Norma : semua orang

Modus Perilaku : larangan

Objek Norma :

1. melawan hukum
2. merobek; atau membikin tidak dapat dibaca; atau merusak maklumat yang dibuat penguasa berwenang/menurut UU
3. memiliki maksud (tujuan):

* mencegah; atau
* menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu.

Kondisi Norma : a.l. tempus dan locus delicti (tunduk pada ketentuan hukum pidana)

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tidak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 3 minggu atau denda paling banyak Rp300.

**Unsur "Barangsiapa"**

Premis mayor:

Semua orang yang telah dewasa, cakap hukum, dan melakukan tindak pidana di Indonesia ADALAH subjek hukum "barangsiapa" (orang perorangan) yang dapat diancam dengan Pasal 219 KUHP.

Premis minor:

Hardi adalah orang yang telah dewasa, cakap hukum, dan melakukan tindak pidana di Indonesia.

Konklusi:

Hardi adalah subjek hukum "barangsiapa" (orang perorangan) yang dapat diancam dengan Pasal 219 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana:

* 1. Unsur **secara melawan hukum**
  2. Unsur **membikin tidak dapat dibaca**
  3. Unsur **maklumat**
  4. Unsur **diumumkan atas nama penguasa yang berwenang**
  5. Unsur **dengan maksud**
  6. Unsur **mencegah/menyukar orang mengetahui isi maklumat.**

Perhatikan:

Dalam praktik, hakim bisa saja memilah unsur-unsur tadi menjadi lebih sedikit jumlahnya, misalnya dengan menggabungkan unsur nomor 3 dan 4 atau unsur nomor 5 dan 6).

**Unsur "Secara Melawan Hukum"**

Premis mayor:

Semua tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan atau alas hak yang sah ADALAH perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum menurut Pasal 219 KUHP.

Premis minor:

Tindakan Hardi menimpa-tindihkan selebarannya tepat di atas pengumuman ajakan pilkada ADALAH tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan atau alas hak yang sah.

Konklusi:

Tindakan Hardi ADALAH perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.

**Unsur "Membikin Tidak Dapat Dibaca"**

Premis mayor:

Semua tindakan yang menghilangkan sebagian atau seluruh dari tampilan pesan sebuah maklumat ADALAH perbuatan yang membikin tidak dapat dibacanya maklumat menurut Pasal 219 KUHP.

Premis minor:

Tindakan Hardi menimpa-tindihkan selebarannya tepat di atas pengumuman ajakan pilkada ADALAH tindakan yang menghilangkan sebagian atau seluruh dari tampilan pesan sebuah maklumat.

Konklusi:

Tindakan Hardi menimpa-tindihkan selebarannya tepat di atas pengumuman ajakan pilkada adalah perbuatan yang membikin tidak dapat dibacanya maklumat menurut Pasal 219 KUHP.

**Unsur "Maklumat"**

Premis mayor:

Semua pengumuman yang dibuat dan dipublikasikan ADALAH maklumat menurut ketentuan Pasal 219 KUHP.

Premis minor:

Selebaran yang ditempelkan KPUD di tempat-tempat strategis di kota Tasikmalaya berisi ajakan mengikuti pilkada ADALAH pengumuman yang dibuat dan dipublikasikan.

Konklusi:

Selebaran yang ditempelkan KPUD di tempat-tempat strategis di kota Tasikmalaya berisi ajakan mengikuti pilkada ADALAH maklumat menurut ketentuan Pasal 219 KUHP.

**Unsur "Diumumkan atas Nama Penguasa yang Berwenang"**

Premis mayor:

Semua pengumuman yang sah dipublikasikan oleh lembaga kekuasaan publik ADALAH maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang menurut Pasal 219 KUHP.

Premis minor:

Selebaran ajakan mengikuti pilkada dari KPUD Tasikmalaya ADALAH pengumuman yang sah dipublikasikan oleh lembaga kekuasaan publik.

Konklusi:

Selebaran ajakan mengikuti pilkada dari KPUD Tasikmalaya ADALAH maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang menurut Pasal 219 KUHP.

**Unsur "Dengan Maksud"**

Premis mayor:

Semua tindakan yang dilatarbelakangi oleh faktor kesengajaaan adalah ADALAH perbuatan dengan maksud menurut Pasal 219 KUHP.

Premis minor:

Tindakan Hardi menimpa-tindihkan selebarannya di atas pengumuman KPUD karena tidak ada tempat kosong yang tersedia di halte itu ADALAH bukan tindakan yang dilatarbelakangi oleh faktor kesengajaan.

Konklusi:

Tindakan Hardi menimpa-tindihkan selebarannya di atas pengumuman KPUD kareana tidak ada tempat kosong yang tersedia di halte itu ADALAH bukan perbuatan dengan maksud menurut Pasal 219 KUHP.

**Unsur "Mencegah/Menyukarkan Orang Mengetahui Isi Maklumat"**

Premis mayor:

Semua tindakan menutup kesempatan orang mengetahui isi pesan suatu pengumuman ADALAH perbuatan mencegah/ menyukarkan orang mengetahui isi maklumat menurut Pasal 219 KUHP.

Premis minor:

Tindakan Hardi tetap membiarkan isi selebaran yang sama dari KPUD masih tertempel tidak jauh dari halte itu dan di tempat lain di kota Tasikmalaya ADALAH bukan tindakan menutup kesempatan orang mengetahui isi pesan suatu pengumuman.

Konklusi:

Tindakan Hardi tetap membiarkan isi selebaran yang sama dari KPUD masih tertempel tidak jauh dari halte itu dan di tempat lain di kota Tasikmalaya ADALAH bukan perbuatan mencegah/menyukarkan orang mengetahui isi maklumat menurut Pasal 219 KUHP.

**AKHIRNYA:**

*Dengan memperhatikan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka hakim akan sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Hardi tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana menurut Pasal 219 KUHP. Selanjutnya, hakim akan mengaitkan kesimpulan di atas dengan NORMA SEKUNDER dari Pasal 219 KUHP (apakah Hardi akan diancam dengan sanksi pidana atau tidak). Dalam kasus ini tentu Hardi akan dibebaskan.*

**Daftar Referensi:**

Sidharta, Arief (2018). Pengantar Logika. (Cet.6). Bandung. PT Refika Aditama

Mundiri. (2018). *Logika.* (Cet.20). Depok. PT RajaGrafindo Persada

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo (1993). Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. (Cet.1).Bandung. PT Citra Aditya Bakti

https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html

<http://darta67.blogspot.com/2009/12/silogisme-dalam-putusan-hakim.html>

[https://e-resources.perpusnas.go.id:2188/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=PNRI-1000&\_\_lrTS=2018 http://darta67.blogspot.com/2009/12/silogisme-dalam-putusan-hakim.html0909022626488&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)](https://e-resources.perpusnas.go.id:2188/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=PNRI-1000&__lrTS=20180909022626488&transitionType=Default&contextData=(sc.Default))

<https://e-resources.perpusnas.go.id:2188/Search/Results.html?query=legal%20reasoning%20theory&jurisdiction=ALLFEDS&saveJuris=False&contentType=ALL&querySubmissionGuid=i0ad7403700000165bc2a06407087e123&startIndex=1&searchId=i0ad7403700000165bc2a06407087e123&kmSearchIdRequested=False&simpleSearch=False&isAdvancedSearchTemplatePage=False&skipSpellCheck=False&isTrDiscoverSearch=False&ancillaryChargesAccepted=False&proviewEligible=False&transitionType=Search&contextData=(sc.Search)>